

Daftar Isi  
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**  
Volume 19 No. 1 Tahun 2017

---

	Halaman
<b>Pengantar Redaksi</b>	iii
<b>Topik:</b>	
☞ Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia <i>Titis Anindyajati</i>	1
☞ Perjuangan Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember: Suatu Bentuk Perlawanan Simbolik Tahun 1998-2005 <i>Mohamad Il Badri, Yety Rochwulaningsih, dan Alamsyah</i>	15
☞ Pengelolaan SDA dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano Laely Nurhidayah	27
☞ Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran Di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional <i>Ani Soetjipto</i>	45
☞ Pengangkatan Putri Mahkota Dan Indikasi Pergeseran Konsep Kuasa Jawa: Analisis Pendahuluan <i>Kurniawati Hastuti Dewi</i>	59
☞ Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah <i>Mardian Sulistyati</i>	77
☞ Analisis Wacana Percakapan Warga Dalam <i>Grup Facebook</i> Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial <i>Ali Kusno</i>	89
☞ Ilustrasi Dalam <i>Serat Sindujoyo</i> <i>Mashuri</i>	105
☞ Aremania: Suatu Bentuk Identitas Pemersatu Kaum Muda Kota Malang Tahun 1992-2000 <i>M. Lukman Hakim, Dewi Yuliati, dan Hariono Rinaldi</i>	119
☞ “Bobotoh Persib” dan Konstruksi Identitas di Era Digital <i>Aulia Hadi</i>	131
<b>Tinjauan Buku:</b>	
☞ Konflik Agraria di Urutsewu <i>Maulida Illiyani</i>	153



## PENGANTAR REDAKSI

---

Pembaca yang berbahagia.

Pada awal tahun 2017 ini Jurnal Masyarakat Budaya (JMB) mengalami setidaknya dua perubahan. Kini, JMB sudah terbit secara elektronik melalui situs [jmb.lipi.go.id](http://jmb.lipi.go.id). Keberadaan jurnal elektronik ini diharapkan dapat memudahkan seluruh pengguna, baik penulis untuk mengirimkan tulisan, pembaca untuk mengakses seluruh tulisan yang telah diterbitkan, maupun dewan redaksi untuk mengelola jurnal secara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor: 119/IPSK.1/SK/III/2017 tertanggal 3 Maret 2017, pengelola JMB mengalami pergantian yang diharapkan dapat memperkuat tim pengelola, baik Penasihat Editorial, Mitra Bestari, Dewan Redaksi, Redaksi Pelaksana, Tenaga Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Sekretariat. ‘Selamat bergabung’ kepada Bapak/Ibu/Saudara semua. Semoga JMB semakin bermanfaat bagi seluruh pengguna di masa depan.

Sepuluh tulisan yang disajikan dalam edisi ini menyajikan berbagai isu kemasyarakatan dan kebudayaan di Indonesia. Tiga tulisan mendiskusikan hukum dan masyarakat adat. Pertama adalah sebuah tulisan berjudul ‘Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia’. Penulis menggarisbawahi bahwa pelaksanaan hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), khususnya hak-hak di bidang sumber daya alam, belum sejalan dengan amanat konstitusi. Tulisan ini menunjukkan kontribusi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyeimbang eksekutif dan yudikatif dalam melahirkan *landmark decision* untuk mendefinisikan KMHA melalui putusan-putusannya.

Berikutnya adalah tulisan tentang perjuangan agraria dari para petani di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Penulis menunjukkan bahwa pergantian rezim dari Orde Baru ke Reformasi (1998) memberikan kesempatan adanya perubahan pola perlawanan petani dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik. Melalui perlawanan simbolik, para petani memperjuangkan hak-haknya hingga memperoleh sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember secara bertahap mulai tahun 2001.

Perjuangan yang lain dilakukan oleh masyarakat adat Enggano. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat, menjadi agenda penting dari perjuangan masyarakat adat Enggano. Masyarakat adat Enggano sebenarnya memiliki elemen-elemen dasar yang mendukung untuk diakui hak adatnya, bahkan untuk dibentuknya desa adat. Namun demikian, penulis menggarisbawahi bahwa Pemerintah Daerah Bengkulu belum melindungi hak-hak masyarakat adatnya dalam peraturan daerah, sehingga keberadaan masyarakat adat Enggano juga belum dapat diakui secara hukum.

Dua tulisan berikutnya mengangkat isu gender. Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran perempuan menjadi sebuah permasalahan yang krusial bagi Indonesia hingga saat ini. Dalam karyanya, penulis mengedepankan perspektif gender dan feminisme untuk menganalisis pengalaman personal perseorangan perempuan dari dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang masuk dalam pasar kerja global yang cenderung berupah rendah dan mengeksploitasi, serta kurang memberikan perlindungan. Selain itu, penulis juga meletakkannya dalam konteks kebijakan negara terhadap PRT migran di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini.

Selanjutnya, tulisan berjudul ‘Pangkatan Putri Mahkota dan Indikasi Pergeseran Konsep Kuasa Jawa: Analisis Pendahuluan’ menganalisis pemberian gelar GKR *Mangkubumi* kepada GKR Pembayun oleh Sultan HB X. Gelar tersebut menandai pengangkatan GKR Pembayun sebagai putri mahkota sekaligus penerus tahta Keraton Yogyakarta. Penulis menggarisbawahi adanya pergeseran konsep kuasa Jawa kontemporer yang memungkinkan perempuan yang sebelumnya hanya berada di posisi pinggiran untuk memegang kuasa.

Isu konflik menjadi pokok bahasan dari dua tulisan berikutnya. Tulisan berjudul ‘Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah’ menunjukkan bahwa konflik

sosial-keagamaan bukan semata-mata disebabkan oleh sentimen agama yang seringkali didengungkan, tetapi juga oleh sentimen kelompok, pemisah ruang, polemik identitas, kesenjangan ekonomi, kecemburuan politik, maupun interfensi elit, seperti yang dialami oleh masyarakat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan non-JAI di Manislor.

Tulisan berikutnya mengamati potensi konflik bernuansa suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dari grup *Facebook Bubuhan Samarinda (FBS)* seiring dengan semakin maraknya penggunaan media sosial. Penulis menunjukkan bahwa percakapan yang terekam dalam FBS memiliki potensi konflik bernuansa SARA karena tingginya primordialisme warga dan sentimen terhadap para pendatang.

Isu terakhir yang digambarkan adalah identitas. Melalui manuskrip *Serat Sindujoyo*, penulis mengkaji makna dari ilustrasi atau cerita gambar. Tulisan ini menggambarkan bahwa *Serat Sindujoyo* memiliki kekhasan pesisir timur Jawa yang berbeda dari Kraton Jawa sekaligus menunjukkan kebermaknaan kulturalnya sebagai sebuah identitas.

Sementara itu, dua tulisan terakhir mendiskusikan identitas dalam kaitannya dengan komunitas pendukung sepak bola. Menggunakan perspektif sejarah, penulis menggambarkan dinamika Aremania yang merupakan komunitas pendukung Persatuan Sepak bola (PS) Arema Malang. Keberadaan Aremania memberikan ruang konstruksi identitas bagi para pendukung yang sebelumnya dikenal sebagai perusuh menjadi tertib dan santun sekaligus melawan hegemoni komunitas pendukung sepak bola Surabaya yang selalu diunggulkan.

Lebih lanjut, tulisan berjudul ‘Bobotoh Persib dan Konstruksi Identitas di Era Digital’ menggambarkan dinamika komunitas bobotoh Persatuan Sepak bola Indonesia Bandung (Persib) dengan berfokus pada konstruksi identitas di era digital. Melalui beragam ekspresi di era digital, penulis menunjukkan bahwa Bobotoh Persib me(re)konstruksi sebuah identitas proyek yang tidak saja merepresentasikan tempat (Bandung) dan etnisitas (kesundaan), tetapi juga konektivitas dengan masyarakat global.

Dalam kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang bersedia untuk berbagi pengetahuan. Semoga berbagai diskusi di edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Selamat membaca.

**POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DI INDONESIA**

---

---

Titis Anindyajati

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta  
titis\_mh@yahoo.com

**Abstrak**

Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam konstitusi dan diturunkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itulah Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang melahirkan Politik Hukum Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Penulisan tentang Masyarakat Hukum Adat sudah banyak, namun belum ada yang lebih spesifik menulis tentang bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi eksistensi KMHA dari aspek politik hukum. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang mengatur lebih tegas tentang keberadaan KMHA. Sementara itu, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis melahirkan *landmark decision* mengenai batasan penting untuk mendefinisikan KMHA. Hal ini merupakan salah satu peran Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.

**Kata kunci:** politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)

**PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH  
KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK  
TAHUN 1998-2005**

---

---

Mohamad Il Badri, Yety Rochwulaningsih, dan Alamsyah

Alumnus pada Program Studi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Diponegoro  
il.badri@yahoo.com, wulan.psa.undip@gmail.com, alam\_mahir@yahoo.com

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perjuangan agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang merupakan suatu bentuk perlawanan simbolik petani pada tahun 1998-2005. Perlawanan petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah dilakukan melalui desakan dan paksaan dengan surat pernyataan sikap kepada pemerintah atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan terhadap kelompok lain. Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekspresikan dalam bentuk wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor perubahan gerakan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik disebabkan oleh pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 dan adanya pelepasan tanah HGU untuk diberikan kepada petani. Legalitas pemilikan tanah di akhir perlawanan simbolik ditandai dengan pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.

**Kata kunci:** perjuangan agraria, bentuk perlawanan simbolik petani

# **PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO**

---

**Laely Nurhidayah**

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
lae\_ly@yahoo.com

## **Abstrak**

Masyarakat adat Enggano adalah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya. Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Enggano memiliki elemen-elemen dasar untuk dapat memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat yang ditaati dan dilaksanakan dalam kelompok adatnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Bengkulu perlu melindungi hak-hak adat masyarakat adatnya dalam peraturan daerah. Pengakuan ini sangat penting dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam Enggano dari eksploitasi dari pihak di luar adat Enggano.

**Kata kunci:** pengelolaan SDA hutan dan laut, masyarakat adat, desa adat, peraturan daerah, hak ulayat.

# **KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PRT MIGRAN DI INDONESIA: TELAH GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

---

**Ani Soetjipto**

Universitas Indonesia, Departemen Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
ani\_soetjipto@yahoo.com

## **Abstrak**

Kajian tentang tentang PRT Pekerja migran sudah banyak dibahas lewat beragam analisis sosial, politik maupun ekonomi. Dalam ilmu hubungan internasional, kajian tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran bisa dianalisis lewat beragam perspektif. Selain lewat perspektif ekonomi politik internasional, kajian tentang PRT migran juga biasa dibahas lewat teori migrasi internasional. Tulisan ini akan membahas dan mengkaji masalah PRT migran di luar negeri lewat perspektif gender dan feminisme persilangannya dengan lensa ekonomi politik internasional dan migrasi internasional. Perspektif gender dan feminisme melihat bahwa pengalaman personal perseorangan sangat terkait erat satu sama lain dengan situasi global dan struktur internasional. Melalui pisau analisis tersebut dijelaskan mengapa perempuan dari dunia ketiga, seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh terlempar ke pasar kerja global, dan tersegmentasi sebagian besar dalam lapangan kerja yang berupah rendah, minim perlindungan, sebagian besar berada dalam sektor informal sebagai PRT, yang cirinya sering terisolasi, serta tidak jarang mengalami eksploitasi dan diskriminasi berlapis lapis. Lewat tulisan ini diharapkan peta persoalan buruh migran perempuan Indonesia tidak hanya bisa dipahami dengan lebih jeli, tetapi juga kebijakan negara terhadap PRT Migran di era pemerintahan Jokowi- JK saat ini bisa ditelaah. Tulisan ini akan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah fenomena empirik situasi PRT migran Indonesia dengan berbagai persoalannya. Bagian kedua memaparkan kerangka pemikiran melalui lensa feminisme dan persilangannya dengan ekonomi politik internasional serta migrasi internasional dalam menyikapi persoalan PRT dan bagaimana isu tersebut diadvokasikan. Bagian terakhir dengan menggunakan kerangka pemikiran tersebut dibahas persoalan PRT migran dalam konteks Indonesia.

**Kata kunci:** gender, migrasi, ekonomi politik internasional, Indonesia

# **PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA DAN INDIKASI PERGESERAN KONSEP KUASA JAWA: ANALISIS PENDAHULUAN**

---

**Kurniawati Hastuti Dewi**  
Pusat Penelitian Politik – LIPI  
kurniawati.dewi@yahoo.com

## **Abstrak**

Tulisan ini menganalisis pemberian gelar baru oleh Sultan HB X kepada GKR Pembayun sebagai GKR *Mangkubumi* yang menandai pengangkatannya sebagai putri mahkota Keraton Yogyakarta dan dipercaya akan menjadi penerus tahta. Beragam analisis sosial dan politik telah dikemukakan mengenai makna pemberian gelar tersebut. Tulisan ini berpendapat bahwa berbagai analisis terdahulu belum sepenuhnya lengkap karena tidak mampu menyajikan analisis yang menyentuh persoalan relasi dan posisi perempuan dan laki-laki sebagai elemen penting dalam konsep kuasa Jawa. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif gender, tulisan ini memberikan pemahaman baru mengenai makna pemberian gelar baru tersebut dikaitkan dengan peran dan posisi perempuan dalam konsep kuasa Jawa masa kini. Metode penarikan data adalah studi literatur karena permintaan wawancara dengan narasumber kunci tidak dapat dilakukan oleh karena sensitifitas persoalan ini. Tulisan ini menemukan bahwa pemberian gelar baru kepada GKR Pembayun sebagai GKR *Mangkubumi* mengindikasikan adanya pergeseran konsep kuasa Jawa khususnya terkait peran dan posisi perempuan. Jika pada masa lalu konsep kuasa Jawa mempersepsikan laki-laki sebagai yang paling mampu memiliki potensi kuasa, saat ini perempuan juga telah diposisikan sebagai pihak yang memiliki potensi kuasa sejajar dengan laki-laki. Perempuan yang dahulu berada pada posisi pinggiran dan hanya dibutuhkan karena fungsi prokreasi (reproduksi) untuk melahirkan keturunan laki-laki, kini dipercaya mampu memegang kuasa dan menjadi pemimpin dalam kosmologi Jawa. Pergeseran konsep kuasa Jawa demikian terjadi karena Keraton Yogyakarta tumbuh berkembang dalam konteks kekinian berupa globalisasi, Islamisasi sosial, demokratisasi, dan kesetaraan gender.

**Kata kunci:** keraton Yogyakarta, putri mahkota, perempuan, kesetaraan gender, kuasa Jawa.

# **DINAMIKA RELASI SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT AHMADIYAH DAN NON-AHMADIYAH**

---

**Mardian Sulistyati**  
Institute of Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
dianmakruf@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam berbagai kasus konflik kekerasan yang marak terjadi di Indonesia, sentimen agama sering dikatakan sebagai faktor utama dibaliknya. Namun demikian, studi-studi kontemporer atas konflik dan perdamaian, menunjukkan bahwa variabel yang menjadi pemicu konflik bukan saja beragam, tetapi juga berlapis dan unik. Tulisan ini mengkaji model relasi dan pengelolaan relasional antarkelompok beragama JAI dan non-JAI di Permukiman Desa Manislor. Dengan menggunakan kaca mata fenomenologi, penelitian ini melihat kedalaman relasi, persepsi, dan konsepsi kedua kelompok; serta dengan sudut pandang strukturalisme genetik Bourdieu, penelitian ini mengungkap relasi kedua kelompok yang bersifat menyatukan dan mengintegrasikan di tengah tarik-menarik situasi kultural dan kekuasaan yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sentimen kelompok, pemisahan ruang, polemik identitas, kecemburuan ekonomi, kecemburuan politik, hingga intervensi elit, turut menyumbang segregasi konflik antara masyarakat JAI dan non-JAI di Manislor, di samping faktor teologis. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor kultural-tradisi yang justru memperkuat ikatan kewargaan antarkelompok, bahkan ketika dalam keadaan bertikai sekalipun. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensitasnya: pengarus utama anahabituaasi-habituaasi lokal sebagai resolusi konflik dalam upaya membangun binadamai nirkekerasan. Begitu pula agen-agen *civil society* yang dengan caranya masing-masing, merupakan potensi penting dalam pengembangan mekanisme penanganan konflik.

**Kata kunci:** relasi sosial-keagamaan, segregasi, ikatan kewargaan, jemaat Ahmadiyah Indonesia, manislor.

# **ANALISIS WACANA PERCAKAPAN WARGA DALAM GRUP FACEBOOK BUBUHAN SAMARINDA: IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK SOSIAL**

---

**Ali Kusno**

Kantor Bahasa Kalimantan Timur  
ali.kusno@kemdikbud.go.id

## **Abstrak**

Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dihuni oleh beragam suku. Gesekan-gesekan antarwarga dan kelompok sering terjadi. Konflik kecil antarwarga melibatkan kesukuan dapat melebar ke konflik SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik bernuansa SARA di Kota Samarinda melalui wacana percakapan warga dalam grup Facebook 'Bubuhan Samarinda' (FBS). Identifikasi percakapan warga melalui grup FBS. Wacana yang terbentuk dalam FBS merepresentasikan isu yang berkembang dalam kehidupan warga Kota Samarinda. Begitu pula sebaliknya, opini yang terbentuk dalam grup FBS mempengaruhi kehidupan warga. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Model Fairclough. Data penelitian diambil dari wacana percakapan anggota grup FBS. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi konflik bernuansa SARA yang didominasi faktor kesukuan. Hal itu didukung oleh tingginya primordialisme warga. Munculnya propaganda bahwa suku tertentu harus disegani. Adanya provokasi antara suku asli dengan pendatang yang lebih banyak dipicu kecemburuan sosial. Terbentuknya stigma bahwa pendatang menjadi biang masalah di Kota Samarinda karena hanya mengeksploitasi kekayaan Kalimantan. Potensi kekerasan menguat karena keberadaan organisasi massa yang mendasarkan pada kesukuan.

**Kata kunci:** konflik sara, Samarinda, analisis wacana kritis, Bubuhan Samarinda

# **ILUSTRASI DALAM SERAT SINDUJOYO**

---

**Mashuri**

Balai Bahasa Jawa Timur  
misterhuri@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian filologi pada manuskrip *Serat Sindujoyo* difokuskan pada ilustrasi atau (cerita) gambarnya. Hal itu bertujuan untuk menelusuri aspek filologi, terutama terkait tekstologi dan kodikologi yang mengarah pada *code unicum* sehingga dapat dikenali pembaca terkini. Hal yang menarik dari kajian ini adalah adanya kekhasan manuskrip dari pesisir timur Jawa, yang memiliki standar yang berbeda dengan manuskrip Jawa lainnya yang bernuansa keraton Jawa, berkenaan dengan karakter dan gaya ilustrasinya. Kesejajaran antara teks tertulis dan ilustrasi menunjukkan bahwa ilustrasi bukanlah pelengkap manuskrip semata karena mengandung nilai kearifan lokal dan kebermaknaan bagi kulturnya sebagai sebuah identitas.

**Kata kunci:** filologi, ilustrasi, *Serat Sindujoyo*.

# **AREMANIA: SUATU BENTUK IDENTITAS PEMERSATU KAUM MUDA KOTA MALANG TAHUN 1992-2000**

---

M. Lukman Hakim, Dewi Yuliati, dan Hariono Rinaldi

Program Studi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Diponegoro

Hakeemlukman89@yahoo.com, dewi\_yulliati@yahoo.co.id, dan rinardiharyono@yahoo.com

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika identitas komunitas suporter PS Arema Malang pada tahun 1992-2000. Pada tahun 1990an kaum muda Kota Malang tukang pembuat onar, mereka terpecah dalam geng-geng antar kampung. Selanjutnya kaum muda Kota Malang menyadari akan kebutuhan identitas pemersatu dan mereka memilih sepakbola untuk mewujudkan persatuan tersebut. Pada awalnya perilaku sebagai pembuat onar terbawa ke kancah sepakbola karena setiap kalah mereka membuat keributan. Pada tahun 1992 terjadi konflik antara suporter Surabaya dengan suporter Malang. Konflik dengan suporter Surabaya salah satu faktor utama konstruksi identitas persatuan kaum muda Kota Malang. Setelah peristiwa tersebut suporter Malang menggunakan nama Aremania, nama tersebut merupakan hasil kesepakatan suporter Malang untuk menjadi suporter yang lebih tertib dan santun. Pada akhirnya Aremania merupakan suatu konstruksi identitas dari suporter perusuh menjadi suporter yang tertib dan santun pada tahun 2000.

**Kata kunci:** identitas, aremania, *arek*, suporter

# **"BOBOTOH PERSIB" DAN KONSTRUKSI IDENTITAS DI ERA DIGITAL<sup>1</sup>**

---

Aulia Hadi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

aulia.hadi.mulyo@gmail.com

## **Abstrak**

Dengan lebih dari 5 juta anggota, Bobotoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) tampaknya menjadi pendukung tim sepak bola terbesar di Indonesia. Tulisan ini menggambarkan dinamika Bobotoh Persib dari tahun 1990-an hingga tahun 2000-an dengan berfokus pada konstruksi identitas di era digital. Tulisan ini berargumen bahwa Bobotoh Persib tidak saja memberikan ruang bagi terciptanya sebuah identitas yang mengakar pada tempat (Bandung), tetapi juga etnisitas (kesundaan). Era digital memberikan ruang yang lebih luas bagi Bobotoh Persib untuk menegosiasikan kembali dirinya. Bobotoh Persib di era digital me(re)konstruksi sebuah identitas proyek yang merepresentasikan orang sunda lokal, pendatang di Kota Bandung, maupun pendukung Persib secara umum, yang terhubung dengan masyarakat global.

**Kata kunci:** Bobotoh Persib, Sepak Bola, Pendukung, Digital, Identitas

